

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah merupakan aspek penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam upaya meningkatkan akuntabilitas, implementasi akuntansi sektor publik dan kualitas laporan keuangan menjadi faktor krusial yang perlu diperhatikan. Hal ini berkaitan dengan berbagai peraturan seperti UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan peraturan terkait sistem pengendalian intern pemerintah.

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah mengacu pada kemampuan untuk mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya publik dan pencapaian tujuan organisasi dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan keuangan publik. Akuntansi sektor publik memungkinkan pemerintah daerah untuk mencatat, melaporkan, dan mengelola sumber daya finansial dengan cara yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Akuntabilitas ini memastikan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan yang diambil serta mencapai hasil yang diharapkan.

Implementasi akuntansi sektor publik di pemerintah daerah merupakan langkah krusial. Kualitas laporan keuangan yang baik dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. Laporan

keuangan yang jelas dan akurat memungkinkan pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, legislator, dan pengawas, untuk memantau dan mengevaluasi penggunaan dana publik serta pencapaian tujuan pemerintah daerah. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah menjadi indikator utama dalam menilai kinerja keuangan pemerintah. Laporan keuangan yang berkualitas memuat informasi yang relevan, akurat, dan dapat dipercaya sehingga memberikan gambaran yang jelas mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas pemerintah daerah.

Implementasi akuntansi sektor public di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan utamanya sejak diberlakukannya berbagai peraturan terkait pengelolaan keuangan daerah. Kualitas laporan keuangan pemerintah jugamasih menjadi sorotan, mengingat adanya temuan audit yang menunjukkan kelemahan penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) menemukan masalah dalam laporan keuangan pemerintah pusat sampai daerah senilai Rp 8,97 trilliun. Temuan ini di muat dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) yang sudah diserahkan BPK kepada DPR.

Dalam beberapa tahun terakhir, akuntabilitas kinerja pemerintah daerah semakin mendapat perhatian, terutama mengingat semakin kompleksnya tantangan pengelolaan keuangan publik. Masalah ini diperparah dengan kurangnya sistem pengendalian intern yang efektif, yang seharusnya menjadi alat utama dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana

publik. Sistem pengendalian intern yang lemah dapat menyebabkan risiko tinggi terhadap penyimpangan, kecurangan, dan ketidakefisienan dalam pengelolaan keuangan. Dengan demikian, terdapat kebutuhan mendesak untuk meneliti bagaimana implementasi akuntansi sektor publik dan kualitas laporan keuangan dapat mempengaruhi akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, serta bagaimana sistem pengendalian intern dapat memoderasi hubungan tersebut.

Permasalahan umum dalam proses akuntabilitas adalah akuntabilitas aparatur pemerintah masih belum memenuhi harapan masyarakat, karena ruang lingkup penggunaannya dalam hal alat yang digunakan masih belum jelas. Secara teoritis, akuntabilitas melibatkan tiga alat utama: verifikasi, tanggung jawab, dan akuntabilitas. Oleh karena itu, terdapat alat akuntabilitas, termasuk prosedur akuntabilitas internal dan eksternal. Konsep akuntabilitas juga cenderung terus menekankan tanggung jawab prosedural, hukum, dan akuntabilitas kepada pejabat terpilih, dan kurang menekankan pada akuntabilitas kepada publik dan masyarakat luas (Febriana *et al.*, 2021).

Implementasi akuntansi sektor public di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan utamanya sejak diberlakukannya berbagai peraturan terkait pengelolaan keuangan daerah. Kualitas laporan keuangan pemerintah jugamasih menjadi sorotan, mengingat adanya temuan audit yang menunjukkan kelemahan penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) menemukan masalah dalam laporan keuangan pemerintah pusat sampai daerah senilai Rp 8,97 trilliun. Temuan ini di muat

dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) yang sudah diserahkan BPK kepada DPR.

Pemerintah daerah wajib meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangannya sehingga masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dapat memantau dan mengevaluasi kinerjanya secara efektif. Oleh karena itu, akuntansi sektor publik yang tepat dan penerapan pelaporan keuangan yang berkualitas merupakan kunci utama untuk mencapai tujuan tersebut. Lebih lanjut, hadirnya sistem pengendalian internal yang efektif sebagai variabel moderasi diharapkan dapat memperkuat dampak praktik akuntan publik dan kualitas pelaporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah.

Hal ini terlihat dari banyaknya temuan BPK yang menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengendalian intern di berbagai daerah. Kurangnya pemahaman dan kapasitas dalam mengelola pengendalian intern menjadi salah satu faktor utama penyebab masalah ini. Masalah yang ditemukan menyangkut kelemahan system pengendalian intern (SPI) mencapai 6.713 masalah. Permasalahan selanjutnya menyangkut ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebanyak 6.702 masalah.

Dilansir dari berita tribun pekanbaru, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru mengalami kesulitan mencapai target pajak pendapatan daerah, yang tercermin dalam capaian PAD sebesar Rp 697,1 miliar hingga pekan kedua Desember 2022, jauh di bawah target yang direncanakan.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun sebagai implementasi pemerintahan mandiri dengan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Lembaga Daerah Kabupaten Madiun memang dilaksanakan yang pada kenyataan hasil yang dicapai belum optimal sesuai dengan yang diharapkan baik menyangkut target setiap tahun maupun tuntutan untuk menggali potensi sumber pendapatan lainnya.

Fenomena ini mendorong perlunya penelitian lebih lanjut untuk memahami apakah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun, sebagai contoh alternatif, telah menerapkan standar akuntansi pemerintah dalam menyusun laporan keuangan mereka. Implementasi akuntansi sektor publik yang baik dapat membantu instansi pemerintah seperti Bapenda untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja mereka, termasuk dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan yang transparan.

## **B. Batasan Masalah**

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Pembahasan dalam penelitian ini dibatasi hanya tentang pengaruh penerapan sektor publik dan laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
2. Instansi yang menjadi objek penelitian adalah instansi

pemerintahan yang berada di kabupaten Madiun.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

- a) Apakah pengaruh implementasi akuntansi sektor publik terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah.
- b) Apakah pengaruh laporan keuangan pemerintah daerah terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah?
- c) Apakah pengaruh sistem pengendalian intern sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara implementasi akuntansi sektor publik.
- d) Apakah pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Menguji secara empiris pengaruh implementasi akuntansi sektor publik terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah.
2. Menguji secara empiris pengaruh laporan keuangan pemerintah daerah terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah.

3. Menguji secara empiris pengaruh sistem pengendalian intern sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara implementasi akuntansi sektor publik.
4. Menguji secara empiris pengaruh sistem pengendalian intern sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

#### **E. Kegunaan**

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini, antara lain :

##### a) Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan di masa yang akan datang, tentang hal-hal yang terkait dengan kekurangan dan kelebihan penerapan akuntansi sektor publik dan kualitas laporan keuangan terhadap kinerja instansi pemerintah.

##### b) Kegunaan Teoritis

###### 1. Bagi penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan acuan bagi studi ilmiah tentang penerapan akuntansi sektor publik dan pengawasan internal terhadap kinerja instansi pemerintah serta dapat digunakan untuk menambah pengetahuan individu yang berasal dari luar perkuliahan dan menggabungkannya dengan pengetahuan yang didapat dari dunia perkuliahan.

## 2. Bagi pembaca

Memberikan tambahan ilmu pengetahuan, dan wawasan khususnya dalam bidang akuntansi sektor publik yang berkaitan dengan penerapan akuntansi sektor publik dan kualitas laporan keuangan dan sebagai referensi bagi peneliti lain yang berkeinginan melakukan penelitian sejenis.